

# MUI Dan "Syahwat" Politik

Waspada 7 Agustus 2015.

Oleh Dr HM. Jamil, MA

**Meski tidak bergenre politik namun tetap saja banyak kekuatan politik yang ingin mengambil jalan pintas dan memanfaatkan vitalitas MUI di tengah tengah umat demi mencapai hasrat dan syahwat politik yang tidak selalu searah dengan kepentingan dan aspirasi umat**

**K**arakteristik Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta adalah sebuah organisasi yang bertujuan mengamalkan ajaran Islam, mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, aman, damai, adil dan makmur. Sebagai wadahnya alim ulama, *zu'ama* serta cendekiawan Muslim, MUI bersifat fungsional, berbeda dengan Ormas lain yang bersifat operasional.

MUI bukanlah organisasi massa, MUI hanya terdiri dari pengurus yang direkrut dari berbagai kalangan dan Ormas yang ada. Karena itu sangat sesuai untuk dijadikan wadah dialog antar umat Islam secara inklusif, di samping antara umat Islam dan pemerintah. Perlu digarisbawahi, MUI tidak berafiliasi dengan salah satu organisasi sosial politik, jadi MUI bersifat netral. Terkait aktivitas dan politik, MUI adalah organisasi dakwah yang bertujuan *amar ma'ruf nahi munkar*.

## Respon/Kritik

Kendati demikian, sejak masa awal berdirinya banyak respons dan kritik masyarakat terhadap organisasi ini (MUI). Sering terdengar suara-suara kritis yang

ditujukan kepada MUI, terutama yang berkaitan dengan sikap dan pendirian MUI, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Respons dan kritik tersebut adakalanya bersifat konstruktif (membangun), tak jarang juga bersifat destruktif.

Ada kritik yang terencana dengan baik dan ada yang sporadis. Sebagai contoh, ada kritik di sebagian masyarakat bahwa MUI terlalu berpihak dan selalu ingin mendekati kepada penguasa. Dahulu, misalnya, alm. Prof Dr Harun Nasution pernah menyatakan bahwa secara material MUI belum bisa melepaskan diri dari pemerintah. Realitasnya memang sampai sekarang demikian. Selain dana, menurut Beliau juga karena aspek sumber daya manusia yang ada di dalamnya (dengan berbagai interpretasi terhadap pernyataan itu).

Memang perlu dicatat bahwa sampai saat ini banyak harapan dari masyarakat agar MUI benar benar menjadi sebuah organisasi yang independen, professional dalam *amar ma'ruf nahi munkar*, seperti pada masa MUI dipimpin untuk pertama kalinya oleh Buya Hamka. Sebagai contoh, ketika itu, MUI bisa menempatkan diri sebagai organisasi independen dan berwibawa serta menjadi alat kontrol efektif terhadap pemerintah. Pada saat itu MUI berhasil

menjalankan perannya sebagai institusi penjaga akidah umat.

Buya Hamka, misalnya, dengan tegas menolak aliran kepercayaan/kebatinan untuk diatur (dimasukkan) ke GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Meski akhirnya di tahun 1978 aliran kepercayaan berhasil masuk GBHN, namun ternyata semangat Buya Hamka itu masih tertanam kuat di dada umat, sehingga di tahun 2000-an setelah jatuhnya Presiden Soeharto, aliran kepercayaan itu pun dihapus dari GBHN oleh Sidang Istimewa MPR. Contoh lain, Beliau juga mengeluarkan fatwa tentang haramnya umat Islam mengikuti perayaan natal dan haram pula mengucapkan selamat natal. Fatwa tersebut mendapat reaksi dari Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara, dan ia mewakili pemerintah meminta fatwa tersebut dicabut.

Buya Hamka memilih mundur dari jabatan Ketua Umum MUI daripada harus mencabut fatwa tersebut. Tegasnya, di masa Beliau, MUI benar-benar menjadi institusi yang independen dari "syahwat" politik dan godaan-godaan kekuasaan. Satu-satunya agenda yang diperjuangkan adalah menjaga akidah umat dan *amar ma'ruf nahi munkar*.

## Syahwat Politik

Arus politik yang bermuara pada kekuasaan memang terkadang menggiurkan, tidak jarang "syahwat" politik oknum-oknum tertentu menjadi bangkit. Tentu menjadi tanda tanya besar jika lajunya arus politik itu mampu menyeret dan menghanyutkan lembaga yang seharusnya menjadi pengawal akidah dan moral terbawa serta dalam arus gegap gempita dan gelombang hiruk pikuknya perhelatan politik (Pilkada).

MUI memang dilahirkan bukan bergenre politik, namun harus diakui bahwa otori-

tasnya dalam mengeluarkan fatwa memiliki pengaruh yang relatif besar dalam dinamika kehidupan umat. Fatwa MUI berlaku bukan sebatas wacana melainkan sebagai sebuah keputusan penting yang banyak dianut lantaran diyakini memiliki tingkat keabsahan dan validitas yang tinggi. Terlebih jika fatwa itu dikeluarkan bukan dikarenakan motif dan kepentingan politik tertentu.

Meski tidak bergenre politik namun tetap saja banyak kekuatan politik yang ingin mengambil jalan pintas dan memanfaatkan vitalitas MUI di tengah tengah umat demi mencapai hasrat dan syahwat politik yang tidak selalu searah dengan kepentingan dan aspirasi umat. MUI yang jelas-jelas tidak bergenre politik harus berani bersikap tegas, menjaga jarak serta menahan diri dari tarikan-tarikan politik dan godaan kekuasaan sehingga MUI tetap terjaga independensinya dan tetap berada di hati masyarakat—sebagai sebuah organisasi yang murni menjaga akidah, akhlak dan *amar ma'ruf nahi munkar*.

## Jangan Terpasung

Pilkada pada umumnya seringkali diwarnai oleh masalah politik uang, munculnya pembunuhan karakter, tersebarnya fitnah, munculnya politik aliran hingga intimidasi dan tidak jarang ancaman terhadap masyarakat agar memilih salah satu calon tertentu. MUI mesti lepas dari warna ini dan mewarnai kehidupan yang tulus mumi membimbing umat untuk kehidupan yang baik dunia dan akhirat. MUI harus independen dan terhindar dari keterpasungan politik, meski MUI juga berkewajiban mewarnai politik dengan *amar ma'ruf nahi munkarnya*. *Wallahu a'lam bi al-shawab*.

Penulis adalah Ketua Umum MUI Binjal.